

**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MAGELANG
DENGAN METODE ANALISIS HIERARKI PROSES (AHP)****Santika Meilani** ✉

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Februari 2014
Disetujui Maret 2014
Dipublikasikan April
2014

Keywords:
Pengurangan Tingkat
Pengangguran, Analisis
Hierarki Proses (AHP),
Unemployment Rate
Reduction, Analytical
Hierarchy Process (AHP)

Abstrak

Kota Magelang merupakan kota kecil yang hanya memiliki beberapa ribu penduduk saja. Namun, tingkat pengangguran di Kota Magelang memiliki peringkat pertama dibanding dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pada tahun 2011 tingkat Pengangguran di Kota Magelang sebesar 8,2% paling tinggi di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan program alternatif mana yang dapat diprioritaskan Kota Magelang untuk mengurangi tingkat pengangguran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil pengisian kuesioner oleh pihak dinas terkait. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang dan jurnal serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP) dan diolah menggunakan expert choice versi 9.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Magelang dapat mengutamakan pada kriteria (1) bantuan dan permodalan dari investor dengan bobot tertinggi yaitu sebesar 0,443 dan dilanjutkan dengan (2) pemberdayaan usaha ekonomi dengan bobot sebesar 0,322 dan (3) pemberdayaan masyarakat dengan bobot sebesar 0,234. Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat disampaikan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Magelang adalah membenahi sarana dan prasarana baik secara internal maupun eksternal merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang untuk mampu mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Kota Magelang, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan para pemangku kepentingan di Kota Magelang.

Abstract

Magelang City is a small town that only has a few thousand residents only. However, the unemployment rate in the city of Magelang has ranked first compared with regencies / cities in Central Java. In 2011 the unemployment rate of 8.2% Magelang highest in Central Java. This study aims to determine which programs can be prioritized alternative Magelang to reduce the unemployment rate. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data sourced from the results of the questionnaires by the related department. Secondary data in this study are the data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) Central Java Province and City of Manila and journals and literature related to the research. The analytical method used is Analytical Hierarchy Process (AHP) and processed using version 9.0 expert choice. These results indicate that efforts to reduce unemployment in the city of Magelang can prioritize the criteria (1) support and capital from investors with the highest weight of 0.443, followed by (2) economic empowerment with a weight of 0.322, and (3) community empowerment with a weight of 0.234. Based on these findings, suggestions can be presented to reduce the unemployment rate in the city of Magelang is to fix the infrastructure both internally and externally is one way that can be done by the government of Magelang to be able to invite investors both within and outside the country to invest in the city of Magelang, as well as improve coordination and cooperation among agencies and stakeholders in the city of Magelang.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Kampus Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Telp/Fax: (024) 8508015, email: edaj_unnes@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang terpenting untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Ekonomi suatu negara atau daerah bisa dikatakan mengalami pertumbuhan apabila kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, kenaikan kapasitas produksi ini di tandai dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah yang terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa perekonomian di negara atau daerah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peralihan dari tingkat ekonomi tertentu yang bercorak sederhana menuju ke tingkat ekonomi yang lebih maju. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu keharusan bagi

kelangsungan pembangunan ekonomi, juga merupakan pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemerataan kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami peningkatan, kenaikan jumlah penduduk tersebut juga berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran.

Masalah pengangguran akan terus terjadi bahkan mengalami peningkatan dan sulit untuk dihilangkan, peningkatan pengangguran di karenakan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah akan menurunkan penyerapan tenaga kerja yang kemudian diikuti dengan meningkatnya pengangguran.

Berdasarkan Tabel 1 terdapat tiga kota di Provinsi Jawa Tengah yang tingkat penganggurannya tinggi, yaitu Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Kota Magelang menjadi peringkat pertama yang tingkat penganggurannya tinggi yaitu sebesar 8,28 %.

Tabel 1

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kabupaten/Kota dan kegiatan selama seminggu di Jawa Tengah Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Mencari Kerja	Sub Jumlah
Kab. Cilacap	93	6,52	853.13
Kab. Banyumas	95	4,95	800.63
Kab. Purbalingga	94	5,54	434.13
Kab. Banjarnegara	94	5,57	454.52
Kab. Kebumen	94	5,18	589.33
Kab. Purworejo	95	4,57	361.91
Kab. Wonosobo	94	5,74	392.46
Kab. Magelang	94	5,92	628.37
Kab. Boyolali	94	5,24	487.93
Kab. Klaten	93	6,21	602.17
Kab. Sukoharjo	94	5,48	435.41
Kab. Wonogiri	96	3,41	501.98
Kab. Karanganyar	94	5,51	431.65
Kab. Sragen	94	5,69	459.76
Kab. Grobogan	94	5,20	684.73
Kab. Blora	93	6,11	452.63
Kab. Rembang	94	5,92	318.98
Kab. Pati	92	7,37	651.09

Kab. Kudus	93	5,21	408.79
Kab. Jepara	93	6,26	562.70
Kab. Demak	94	5,70	536.41
Kab. Semarang	93	6,12	496.10
Kab. Temanggung	94	5,24	380.59
Kab. Kendal	94	5,59	472.94
Kab. Batang	94	5,91	369.57
Kab. Pekalongan	93	6,12	419.44
Kab. Pemalang	93	6,34	631.74
Kab. Tegal	93	6,89	702.72
Kab. Brebes	93	6,63	882.97
Kota Magelang	91	8,28	64.238
Kota Surakarta	93	6,36	266.30
Kota Salatiga	93	6,39	89.609
Kota Semarang	93	6,93	828.23
Kota Pekalongan	92	7,29	141.46
Kota Tegal	92	7,14	124.04

Sumber: SAKERNAS, BPS

Banyaknya pengangguran sebesar 8,28% dari data angkatan kerja di Kota Magelang diduga karena jumlah perusahaan industri di Kota Magelang tidak dapat menampung jumlah angkatan kerja di Kota Magelang yang menganggur. Jumlah perusahaan industri di Kota Magelang yang dapat dilihat pada data tabel 1.2 menjelaskan bahwa perkembangan jumlah perusahaan industri di Kota Magelang mengalami kenaikan pada tahun 2007-2009 sehingga jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan industri meningkat pula setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2010 jumlah perusahaan industri kecil di Kota Magelang mengalami penurunan yaitu sebesar 579 yang semula pada tahun 2009 yaitu sebesar 1787. Hal ini dikarenakan banyaknya

pemilik usaha yang beralih profesi menjadi karyawan diperusahaan lain yang sejenis. Dengan keadaan seperti ini banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan dan menganggur, yang berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran di Kota Magelang. Pada tahun 2011 jumlah perusahaan industri mengalami kenaikan kembali, namun kenaikan yang di alami tidak sebanding dengan penurunan jumlah perusahaan industri pada tahun 2010, dan kesempatan kerjapun masih kurang menampung untuk masyarakat yang masih menganggur karena perbandingan perusahaan industri dan tenaga kerja yang menganggur yaitu 1:4 yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kota Magelang sebesar 8,28%.

Tabel 2

Banyaknya Perusahaan Industri Di Kota Magelang

Tahun	Perusahaan Industri Kecil (Unit)	Perusahaan Industri Besar (Unit)	Jumlah Perusahaan	Penyerapan Tenaga Kerja Oleh Industri
2007	1724	16	1740	8451
2008	1744	16	1760	8561
2009	1787	17	1804	8739
2010	579	22	601	6209
2011	634	25	659	6809

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Magelang merupakan Wilayah Jawa Tengah dan merupakan bagian kota yang masuk dalam strategi pembangunan dari wilayah pembangunan VII yang meliputi

Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab. Purworejo dengan pusatnya di Kota Magelang. Keberadaan Kota Magelang juga sangat menguntungkan bagi kota-kota di sekitarnya.

Pada Tabel 3 menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah angkatan kerja pada tahun 2007-2011 fluktuatif. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Magelang tertinggi yaitu pada tahun 2008, yaitu sebesar 2,99%. Bertambahnya dan berkurangnya jumlah

penduduk disebabkan oleh kelahiran, kematian atau migrasi. Pertumbuhan pencari kerja tertinggi selama periode tahun 2007-2011 di Kota Magelang terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 36,23%, penurunan tingkat pengangguran yang cukup besar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 35,33%, namun tingkat pengangguran tersebut masih sangat tinggi dibanding dengan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3
Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja di Kota Magelang (Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Angkatan Kerja				
			Bekerja		Mencari Pekerjaan		Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
			Jiwa	Pertumbuhan (%)	Jiwa	Pertumbuhan (%)	
2007	121010	1,99	55670	(-2,61)	7855	36,23	63525
2008	124627	2,99	54554	(-2,00)	7639	(-2,75)	62193
2009	125640	0,78	56107	2,85	9863	29,11	65970
2010	126443	0,64	53719	(-4,26)	8226	(-16,59)	61945
2011	118805	(-6,04)	58919	9,68	5319	(-35,34)	64238

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Permasalahan pengangguran memang merupakan isu penting dan sangat menarik untuk dibahas. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan, tingkat inflasi dan besaran upah yang ditetapkan. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sukirno, 2008).

Permasalahan yang mendasar pada ketenagakerjaan yaitu masalah upah yang rendah secara tidak langsung akan berpengaruh

pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini di sebabkan karena penambahan jumlah tenaga kerja baru jauh lebih besar dibanding dengan pertumbuhan penyediaan lapangan kerja setiap tahunnya. Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa tingkat upah di Kota Magelang meningkat setiap tahunnya, dan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang juga mengalami penurunan. Namun pada tahun 2009 tingkat pengangguran meningkat kembali sebesar 29,11% sedangkan tingkat upah pada tahun 2009 meningkat dari Rp 560.000 menjadi Rp 665.000

Tabel 4
Data UMR Kota Magelang Tahun 2007-2011

Tahu	UMR (Rp)
2007	520.000
2008	570.000
2009	665.000
2010	745.000
2011	795.000

Kondisi yang ideal dari pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan tenaga kerja adalah ketika pertumbuhan ekonomi mampu menambah penggunaan tenaga kerja secara lebih besar (Dimas,2009). Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi PDRB yang diharapkan dapat menciptakan lapangan perkerjaan ternyata masih belum optimal. Penyerapan

tenaga kerja di Kota Magelang juga mengalami kondisi seperti ini pada tahun 2007 dan 2010. Pada tahun 2007 perekonomian tumbuh sebesar 5,17 yang diikuti dengan penurunan jumlah pekerja sebesar 2,62. Kemudian pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12 dan diikuti penurunan jumlah pekerja sebesar 4,26 (tabel 3 dan tabel 5).

Tabel 5
Produk Domestik Regional Burto Kota Magelang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000-2011

Tahun	PDRB	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007	946	5,17
2008	993	5,05
2009	100	5,11
2010	110	6,12
2011	116	5,48

Sumber: BPS Kota Magelang

LANDASAN TEORI

Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja (man power) adalah penduduk yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002). Secara ringkas, tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang di maksud dengan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa.

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi. Kesejahteraan dan pemerataan pendapatan merupakan komponen pembangunan ekonomi yang akan diperoleh melalui partisipasi dalam kesempatan kerja.

Kesempatan kerja menurut Soedarsono (1988), mengandung pengertian besarnya kesediaan usaha produksi dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, hal ini dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja dalam suatu kegiatan ekonomi (produksi), termasuk semua lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowong.

Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja adalah tarik-menarik antara permintaan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Faktor utama naik turunnya jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja biasanya adalah besar kecilnya gaji yang akan diperoleh tenaga kerja dan besar kecilnya gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja.

Pengertian Investasi

Lipsey (1995) menyebutkan investasi adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi seseorang melakukan investasi untuk memperoleh penghasilan selama suatu jangka waktu tertentu menambah nilai modal yang ditempatkan dan menjaga terhadap inflasi. Namun itu semua dilakukan dengan tingkat resiko yang dapat ditolerir.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam maupun luar negeri.

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori Upah

Upah adalah pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lainnya yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 2008).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu yang merupakan bahan untuk analisis dalam suatu keputusan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakan. Sedangkan data primer untuk perumusan kebijakan dalam Analisis Hierarki Proses (AHP) diperoleh dari key-persons, meliputi penentuan kriteria dalam rangka mencapai tujuan mengurangi pengangguran, penentuan dalam pemilihan alternatif program apa saja yang dapat ditempuh untuk mengurangi pengangguran. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait, yaitu BPS dan Sakernas.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS Jawa Tengah dan BPS Kota Magelang. Dan data primer yaitu dengan cara mengajukan kuesioner kepada responden (key-persons) untuk

mengetahui program apa saja yang menjadi prioritas utama dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran.

Metode Analisis Data

Analisis Hierarki Proses

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis hierarki proses. Analisis Hierarki Proses (AHP) adalah suatu metode yang sering digunakan untuk menilai tindakan yang dikaitkan dengan perbandingan bobot kepentingan antara faktor serta perbandingan beberapa alternatif pilihan. Metode AHP merupakan suatu model yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1971. Dalam prosesnya, AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis yang bergantung pada imajinasi, pengalaman dan pengetahuan. Di lain pihak, proses AHP memberi suatu kerangka bagi partisipasi kelompok dalam pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hierarki Proses

Alternatif-alternatif kebijakan untuk pengurangan masalah tingkat pengangguran diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan *key-persons*. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara tersebut diperoleh tiga kelompok program pengurangan tingkat pengangguran berbasis bantuan dan permodalan dari investor, kelompok program pengurangan tingkat pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat dan kelompok program pengurangan tingkat pengangguran berbasis pemberdayaan usaha ekonomi.

Kelompok program pengurangan tingkat pengangguran berbasis bantuan dan permodalan dari investor dalam kasus ini yaitu memperoleh bantuan dari para investor dalam penanaman modal yang bertujuan untuk penambahan jumlah lapangan kerja, contohnya program peningkatan promosi dan kerjasama investasi juga program peningkatan iklim dan realisasi investasi agar para investor bersedia menginvestasikan modalnya, program penyiapan sumberdana, sarana dan prasarana

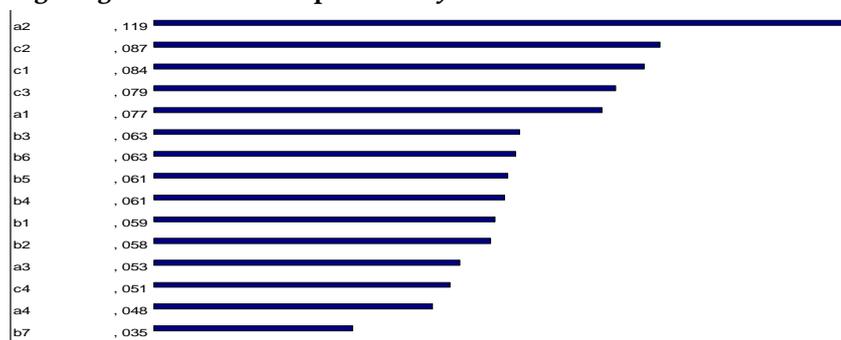
juga program pengembangan data dan informasi dari Kota Magelang sendiri agar dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kota Magelang.

Kelompok program berikutnya adalah kelompok program pengurangan tingkat pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam kasus ini pengurangan tingkat pengangguran perkotaan dilakukan dengan menciptakan SDM yang berkualitas sehingga ada kemandirian masyarakat dalam menghadapi masalah sosial dan bisa memiliki performa yang baik dalam dunia kerja. Aspek pemberdayaan bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk bisa lebih berkarya dan dapat menciptakan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain.

Kelompok program yang terakhir adalah kelompok program pengurangan tingkat pengangguran berbasis pemberdayaan usaha ekonomi. Kelompok program ini bertujuan untuk memberikan akses dan peluang bagi masyarakat untuk membentuk atau membuat usaha berskala mikro dan kecil. Dalam hal ini pengurangan tingkat pengangguran berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang menganggur. Berikut ini adalah beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengurangi tingkat pengangguran ditinjau dari pemberdayaan usaha ekonomi antara lain adalah program peningkatan iklim UMKM yang kondusif dan program pengembangan sistem peluang usaha bagi UMKM agar masyarakat dapat menciptakan usaha berskala mikro, kecil maupun menengah sendiri. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UMKM juga program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi untuk memperkuat dan pengembangan usaha mikro, kecil maupun menengah.

Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa skala prioritas kriteria dan alternatif dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran melalui metode AHP berdasarkan keseluruhan *key-persons* adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Urutan Prioritas Seluruh Alternatif Program dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Magelang Berdasarkan Responden *KeyPersons*



Sumber: Output AHP, 2013
 inconsistency ratio = 0,07

Berdasarkan gambar 1 analisis tersebut memiliki nilai *inconsistency ratio* sebesar 0,07 yang berarti hasil analisis tersebut konsisten dan dapat diterima. Dapat dilihat bahwa menurut *key-persons* dari keseluruhan pilihan alternatif program dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran yang paling tinggi tingkat prioritasnya adalah program peningkatan iklim dan realisasi investasi dengan bobot sebesar 0,119 dari kelompok program pengurangan tingkat pengangguran berbasis bantuan dan permodalan dari investor. Urutan prioritas program seluruh alternatif program dari yang tertinggi ke yang terendah yaitu:

1. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi dengan bobot 0,119
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UMKM dengan bobot sebesar 0,087
3. Program peningkatan iklim UMKM yang kondusif dengan bobot sebesar 0,084
4. Program pengembangan sistem peluang usaha bagi UMKM dengan bobot sebesar 0,079
5. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan bobot sebesar 0,077
6. Program peningkatan disiplin aparatur dengan bobot sebesar 0,063
7. Program peningkatan kesempatan kerja dengan bobot sebesar 0,063
8. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan bobot sebesar 0,061
9. Program pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan dengan bobot sebesar 0,061
10. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan bobot sebesar 0,059
11. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan bobot sebesar 0,058
12. Program penyiapan sumberdana, sarana dan prasarana dengan bobot sebesar 0,053
13. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan bobot sebesar 0,051
14. Program pengembangan data dan informasi dengan bobot sebesar 0,048

15. Program perlindungan dan pengembangan lembaga keuangan dengan bobot sebesar 0,035

investor dapat mengetahui informasi mengenai Kota Magelang. Informasi tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan media elektronik dan media cetak.

PEMBAHASAN

Hasil AHP menyimpulkan bahwa Kota Magelang memiliki banyak strategi yang dapat dilakukan dalam pengurangan tingkat pengangguran. Berdasarkan olah AHP strategi yang paling utama dilakukan adalah kriteria bantuan dan permodalan dari investor. Pentingnya bantuan dan permodalan dari investor dijalankan sebagai salah satu pemasuk modal dalam ekonomi Kota Magelang, hal ini dikarenakan pada kriteria bantuan dan permodalan dari investor lebih terfokus pada penyediaan modal untuk lebih mengembangkan dan memperluas penyediaan lapangan kerja. Empat strategi dalam kriteria bantuan dan permodalan dari investor yaitu:

1. Peningkatan iklim dan realisasi investasi agar investasi dari investor dapat membuka peluang dan peningkatan dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru.
2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi guna meningkatkan promosi potensi Kota Magelang serta pengembangan jaringan kerjasama investasi.
3. Penyiapan sumberdana, sarana dan prasaran, dengan membangun infrastruktur yang memadai akan membuat investor lebih yakin untuk berinvestasi di Kota Magelang.
4. Pengembangan data dan informasi dengan membangun promosi baik nasional maupun internasional agar para

Pemberdayaan usaha ekonomi menjadi kriteria kedua yang dipilih oleh responden *key-persons* dalam mengurangi tingkat pengangguran. Strategi dalam kriteria pemberdayaan usaha ekonomi yaitu:

1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UMKM, mengembangkan dunia usaha dan memperkenalkan lebih luas lagi kepada masyarakat sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui tentang dunia usaha dan bagaimana menciptakan usaha baru.
2. Meningkatkan iklim UMKM yang kondusif, dapat terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja koperasi dan UMKM.
3. Pengembangan sistem peluang usaha bagi UMKM, meningkatkan promosi dan informasi dalam kaitannya untuk meningkatkan diversifikasi usaha dan memanfaatkan distribusi.
4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM agar mampu bersaing dalam perekonomian.

Pemberdayaan masyarakat menjadi kriteria ketiga yang dipilih oleh *key-persons* dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Strategi dalam kriteria pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Peningkatan disiplin aparatur
2. Peningkatan kesempatan kerja, dalam hal ini tingkat kesempatan

kerja yang tinggi akan mengurangi tingkat pengangguran.

3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan (training) sehingga produktivitas tenaga kerja kualitasnya semakin baik pada masa yang akan mendatang.
4. Pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan, sehingga dapat terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyebarluasan bursa kerja.
5. Pelayanan administrasi perkantoran
6. Peningkatan sarana dan prasarana
7. Perlindungan dan pengembangan lembaga keuangan

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasar analisis hierarki proses yang dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tingkat pengangguran di Kota Magelang masih sangat tinggi, terbukti bahwa Kota Magelang menduduki peringkat pertama tingkat pengangguran paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011. Peringkat kriteria yang menjadi prioritas dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran di Kota Magelang adalah bantuan dan permodalan dari investor dengan bobot sebesar 0,443 dan *inconsistency ratio* sebesar 0,1 (batas maksimum) yang berarti hasil analisis tersebut teruji konsisten dan dapat diterima. Prioritas utama dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran berbasis bantuan dan permodalan dari investor adalah program peningkatan iklim dan realisasi investasi dengan bobot sebesar 0,401 dan *inconsistency ratio* sebesar 0,04. Prioritas utama dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran berbasis pemberdayaan usaha ekonomi adalah pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UMKM dengan bobot sebesar 0,288 dan *inconsistency ratio* sebesar 0,09. Prioritas utama dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat adalah

peningkatan disiplin aparatur dengan bobot sebesar 0,158 dan *inconsistency ratio* sebesar 0,02. Berdasarkan analisis AHP oleh keseluruhan *key-persons* dapat disimpulkan bahwa program peningkatan iklim dan realisasi investasi merupakan prioritas utama dengan bobot tertinggi dari keseluruhan alternatif kebijakan dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran dengan bobot sebesar 0,119 dan *inconsistency ratio* sebesar 0,07 yang berarti hasil analisis tersebut konsisten dan dapat diterima.

SARAN

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka dapat diberikan sejumlah saran sebagai berikut: (1)Membenahi sarana dan prasarana baik secara internal maupun eksternal merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk mampu mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Kota Magelang. (2)Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan para pemangku kepentingan di Kota Magelang. Baik dari Pemerintah Kota Magelang, Para Pengusaha dan masyarakat Kota Magelang untuk dapat melaksanakan program-program pengurangan tingkat pengangguran di Kota Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Farid. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1998-2007*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka
- Amri Amir. 2007. "Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia". *Jurnal Inflasi dan Pengangguran Vol. 1 no. 1, 2007*, Jambi.
- Barthos, Basir. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dimas dan Nenik Woyanti. 2009. "Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vil. 16, no.1*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Giralson. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.

Kaufman, Bruce E dan Julie L Hotchkiss. 1999. *The Economic Labor Markets*. USA: Georgia State University.

Lipsey, G. Richard, dkk. 1995. *Pengantar Mikro Ekonomi Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa oleh Jaka Wasana dan Kirbrandoko*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Payaman, Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.

-----, 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FEUI.

Seodarsono dkk. 1988. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Karunia.

Irawan, & M. Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPF.

Sukirno, Sadono. 2008. *Mikro Ekonomi. Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 1994. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeratno, Lincolin Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Swastha, Basu. 2000. *Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*. Jakarta: Liberty.

Winardi. 1991. *Pengantar Manajemen Penjualan (Sales Management)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saaty. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dan Situasi yang Komplek*. Terjemahan. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.